

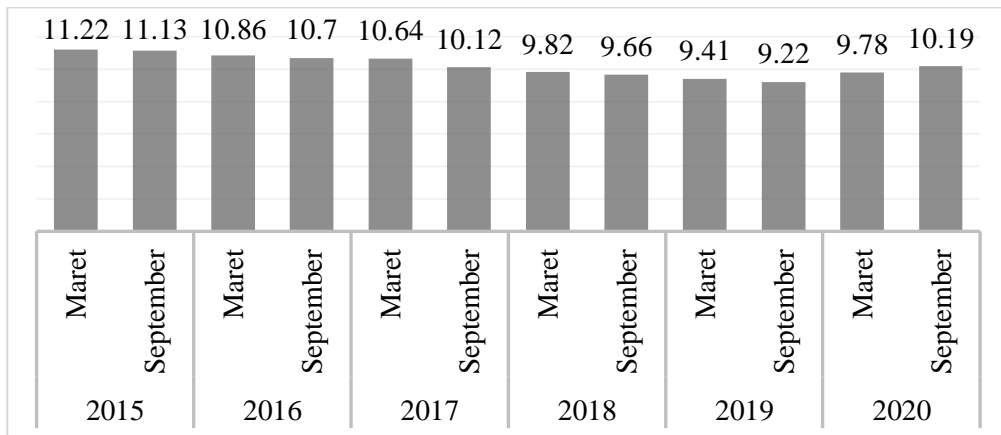
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan dapat dikatakan sebagai keadaan ketidakmampuan individu atau keluarga dalam mencukupi kebutuhan standar hidup minimum. Selain itu, kemiskinan disebabkan oleh kebijakan pemerintah terkait masalah pembangunan yang tidak memadai atau tidak sesuai dengan kapasitas masyarakat, sehingga sebagian masyarakat tidak merasakan manfaat dari proses pembangunan yang dihasilkan (Arsyad, 2010). Masalah kemiskinan memerlukan penanggulangan yang tepat dan berkelanjutan. Pemerintah daerah selama ini telah memberikan perhatian yang sangat besar pada masalah pengentasan kemiskinan melalui program-program pembangunan yang bersifat *pro-poor*, namun demikian kemiskinan tetaplah masih menjadi masalah yang berkepanjangan sampai saat ini.

Kemiskinan di Indonesia sudah menjadi masalah yang sangat umum di hadapi, hampir disetiap negara berkembang mempunyai masalah yang hampir sama yaitu kemiskinan, terutama negara yang padat penduduknya seperti Indonesia. Kemiskinan yang terjadi disuatu negara menjadi tolak ukur untuk melihat baik buruknya perekonomian suatu negara. Kemiskinan bukanlah hanya menjadi masalah pribadi dan pemerintah saja, tetapi juga menjadi masalah kita bersama yang harus ditekan jumlahnya.

Persentase penduduk miskin atau *Head Count Index* (HCI-P0) merupakan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. *Head count index* digunakan untuk mengukur proporsi atau persentase penduduk yang tergolong miskin. Angka yang ditunjukkan oleh indeks penduduk menunjukkan proporsi penduduk miskin di suatu daerah, rasio yang tinggi artinya proporsi rumah tangga miskin di suatu daerah juga tinggi (Badan Pusat Statistik, 2021). Kondisi persentase penduduk miskin di Indonesia dapat diketahui melalui gambar sebagai berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Berdasarkan Semester

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2015 sampai dengan September 2019 mengalami penurunan yang baik hingga dapat menyentuh angka dibawah 10%. Ini menunjukkan pembangunan ekonomi sebagai upaya pengentasan kemiskinan melalui program yang dicanangkan pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dapat di realisasikan dengan baik. Salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH) yang berupaya untuk mengakhiri siklus kemiskinan di kalangan penduduk termiskin. Namun, pada tahun 2020 angka kemiskinan mengalami peningkatan dua digit, sebagai akibat dari pandemi Covid-19 yang menurunkan produktivitas dari setiap sektor lapangan usaha.

Pendidikan telah menjadi kebutuhan pokok bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, yang dimaksud dengan pendidikan ialah usaha sadar dan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Todaro (2013) mengemukakan bahwa struktur pendidikan yang berlaku pada suatu daerah dapat mempengaruhi karakter sosial dan ekonomi masyarakat pada daerah yang bersangkutan. Sanz, *et al* (2017) berpendapat bahwa kemiskinan sangat

mungkin dipengaruhi oleh pendidikan. Adanya keterbatasan dalam hal pendidikan akan menyebabkan terhambatnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.

Menurut Schultz (1961) dan Becker (1964), pendidikan merupakan investasi yang dilakukan di masa kini oleh sumber daya manusia dengan tujuan memperoleh hasilnya di masa yang akan datang. Sependapat dengan Schultz & Becker, menurut Todaro (2013) menyatakan bahwa salah satu modal manusia yang paling penting adalah pendidikan formal. Semakin baik akses masyarakat dalam memperoleh pendidikan, semakin besar pula kesempatan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan. Sehingga pembangunan yang terfokus pada sumber daya manusia bisa tercapai. Penelitian yang dilakukan oleh Hong & Pandey (2007) menyimpulkan bahwa penduduk dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk menjadi miskin. Menurut Ataguba, *et al* (2013) salah satu penentu penurunan tingkat kemiskinan adalah faktor pendidikan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Amalia (2012); Bintang & Woyanti (2018); Islami & Anis (2019); Ariska (2021) yang menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan Kurniawan (2018); Fahmi (2016) yang menyatakan Pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Pendidikan dipandang investasi yang imbalannya dapat diperoleh beberapa tahun kemudian dalam bentuk penambahan hasil kerja, yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat produktifitas.

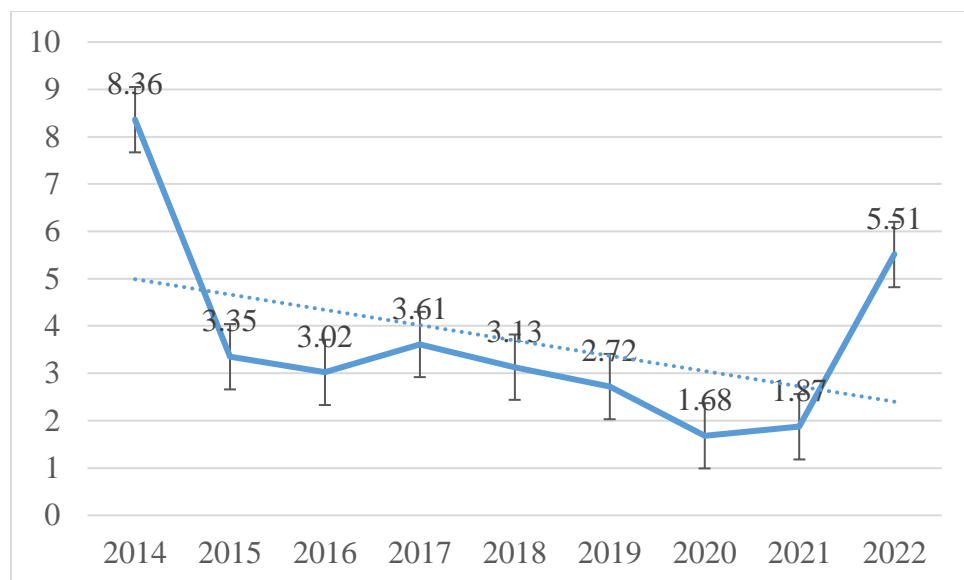
Selain pendidikan, kesehatan juga menjadi kebutuhan pokok bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurut *World Health Organization* (WHO), yang dimaksud dengan sehat yaitu keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan individu hidup secara produktif baik dalam aspek sosial maupun aspek ekonomi. Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 dituliskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Dalam hal ini, Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah

dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan derajat kesehatan pada khususnya. Menurut Mariyanti & Mahfudz (2016), dalam konteks kesehatan, konsumsi nutrisi yang buruk dapat memberikan dampak pada tingkat kemiskinan sehingga negara yang penduduknya sehat juga diyakini akan memiliki perekonomian yang “sehat”. Menurut Wyk & Bradshaw (2017) masyarakat yang memiliki Angka Harapan Hidup yang baik akan meningkatkan kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi Sedangkan menurut Ataguba, et al (2013) kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam mengurangi kemiskinan. Sejalan dengan hasil tersebut, Bakhtiari & Meisami (2009) menyatakan adanya peningkatan di bidang kesehatan akan menurunkan tingkat kemiskinan.

Strauss & Thomas (1995) berpendapat bahwa ada keterkaitan yang kuat antara kesehatan dengan kemiskinan. Kesehatan individu menentukan produktivitas sehingga semakin rendah tingkat kesehatan, semakin besar kemungkinan individu untuk terjebak dalam kemiskinan. Upaya pemerintah dalam memperbaiki sarana dan prasarana kesehatan cukup penting dalam mengentaskan kemiskinan (Arsyad, 2010). Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dalam jangka panjang akan meningkatkan produktivitas, khususnya bagi masyarakat yang tergolong kurang mampu. Menurut Topuz (2009) bantuan kesehatan dari pemerintah seperti asuransi dapat secara efektif mengurangi tingkat kemiskinan. Penelitian ini sejalan dengan Bintang & Woyanti (2018); Fahmi (2016) dan Anggadini (2015) menunjukkan tingkat harapan hidup memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan artinya kualitas kesehatan masyarakat semakin meningkat seiring dengan meningkatnya angka harapan hidup. Penelitian ini tidak sejalan dengan Islami & Anis (2019) menunjukkan Kesehatan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia.

Inflasi merupakan salah satu indikator perekonomian yang penting, laju pertumbuhannya selalu diupayakan rendah dan stabil agar supaya tidak menimbulkan penyakit makroekonomi yang nantinya akan memberikan dampak ketidakstabilan dalam perekonomian. Inflasi memiliki dampak

positif dan negatif terhadap perekonomian. Apabila perekonomian suatu negara mengalami suatu kelesuan maka Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan moneter yang ekspansif dengan cara menurunkan tingkat suku bunga. Inflasi yang tinggi dan tidak stabil merupakan cerminan dari ketidakstabilan perekonomian yang berakibat pada naiknya tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus, dan berakibat pada makin tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia. Kondisi tersebut dapat terlihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 2. Inflasi Indonesia

Tingkat inflasi pada 2022 tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat inflasi yang sedikit meningkat ini terutama dipicu oleh pola musiman awal tahun dan peningkatan mobilitas masyarakat. Sepanjang Januari hingga Agustus 2022, inflasi tertinggi terjadi pada Juli 2022, dimana inflasi tercatat sebesar 4,94 persen atau melebihi kisaran target BI 2-4 persen. Inflasi yang tinggi tersebut merupakan yang tertinggi sejak Oktober 2015 yang kala itu mencapai 6,25 persen. Adapun kelompok yang memberikan andil paling besar terhadap inflasi berasal dari kelompok *volatile food* yang tercatat mengalami inflasi sebesar 1,41 persen (*month-to-month/mtm*) atau 11,47 persen secara tahunan. Dengan capaian tersebut, kelompok ini memberikan andil terhadap inflasi sebesar 0,25 persen.

Karena semakin tinggi tingkat inflasi maka masyarakat yang awalnya dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan adanya harga barang dan jasa yang tinggi dia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehingga menimbulkan kemiskinan dan tingkat inflasi di Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Faktor penyebab *demand pull inflation* adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau permintaan total (*aggregate demand*) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonomi. Ekspektasi inflasi tersebut dapat bersifat adaptif atau *forward looking*.

Dalam penelitian Andiny & Ningsih (2018) inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Hasil ini juga didukung oleh teori yang menyatakan bahwa inflasi akan meningkatkan biaya produksi yang menimbulkan kenaikan harga barang dan jasa. Kenaikan harga ini menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan berujung pada peningkatan kemiskinan. Hasil penelitian tidak sejalan dengan Amalia (2012) dan Kasim *et al* (2021) yang menyatakan inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan artinya kenaikan inflasi menimbulkan daya beli masyarakat yang menurun yang berujung pada peningkatan kemiskinan. Hasil penelitian berbeda dikemukakan oleh Susanto & Pangesti (2020); Ariska *et al* (2021) dan Nafi'ah (2021) menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Berdasarkan permasalahan yang sesuai dengan penjelasan diatas maka penulis perlu menganalisis lebih jauh terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia sehingga penulis akan melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2015-2021**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat disusun pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2015-2021?
2. Apakah kesehatan berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2015-2021?
3. Apakah inflasi berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2015-2021?

C. Pembatasan Masalah

Ruang lingkup dalam penelitian ini menganalisis pengaruh Pendidikan, Kesehatan dan Inflasi terhadap tingkat kemiskinan dengan data observasi provinsi di Indonesia dari tahun 2015-2021.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2015-2021.
- b. Menganalisis pengaruh kesehatan terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2015-2021.
- c. Menganalisis pengaruh inflasi terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2015-2021.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak terkait, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini membuktikan apakah teori lingkaran kemiskinan dapat diputus melalui Pendidikan, Kesehatan dan Inflasi.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta sebagai referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi pemerintah pusat penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan masukan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan pengentasan kemiskinan sehingga dapat mendorong pembangunan ekonomi yang ideal untuk kesejahteraan masyarakat.

b. Bagi pemerintah daerah penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam proses pembangunan daerah.